

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian merupakan salah satu sektor terpenting bagi sebuah negara, khususnya di Indonesia. Dalam masa sekarang, ketatnya persaingan dalam dunia usaha sangatlah tinggi. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki kemampuan yang kuat di berbagai bidang, seperti bidang keuangan, bidang operasional perusahaan, bidang pemasaran, dan bidang sumber daya manusianya. Bidang keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Ketatnya persaingan antar perusahaan, belum lagi kondisi perekonomian yang tidak menentu, yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, sebaiknya perusahaan harus selalu mencermati dan memperhatikan kondisi serta mengetahui kinerja perusahaan yang membutuhkan suatu analisis perusahaan secara tepat.

Hotel memiliki fungsi utama sebagai sarana akomodasi tempat menginap sementara bagi para tamu yang datang dari berbagai tempat. Hotel adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa, dalam bentuk penginapan atau akomodasi serta menyediakan hidangan dan fasilitas lainnya untuk umum, yang memenuhi syarat-syarat kenyamanan, privasi dan bertujuan komersional. Menurut Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No.KM37/PW.340/MPPT-86, Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Bisnis hotel mempunyai tujuan yaitu mendapatkan pendapatan seoptimal mungkin melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu (*guest need and wants*). Kepuasan tamu menjadi sasaran layanan untuk membentuk citra hotel yang baik dan sekaligus menjaga keberadaan hotel dalam jangka panjang

Namun seiring perkembangan zaman, fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap saja, akan tetapi juga sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, pesta pernikahan, lokakarya, musyawarah nasional, dan berbagai kegiatan lainnya. Hotel dijadikan tempat berbagai kegiatan karena memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan tamu.

Semenjak pemberlakuan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 Tentang Pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, membawa dampak yang besar terhadap sektor perhotelan. Dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, agar dilakukan langkah-langkah diantaranya menyelenggarakan seluruh kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing atau instansi pemerintah lainnya,

menghentikan rencana kegiatan konsinyering/ *Focus Group Discussion* (FGD) dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor seperti di hotel/ villa/ cottage/ resort selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

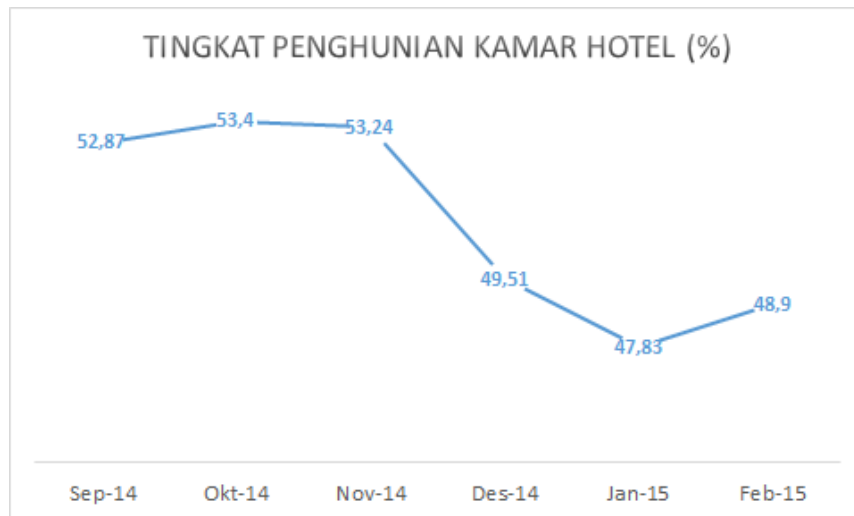
Penerapan kebijakan tersebut tentunya sangat berdampak terhadap keberlangsungan bisnis di sektor perhotelan, yang dibuktikan dengan turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) hotel seperti disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Bulan	TPK (%)
Sep-14	52,87
Okt-14	53,40
Nov-14	53,24
Des-14	49,51
Jan-15	47,83
Feb-15	48,90

Sumber: BPS Jatim 2014-2015

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada 3 bulan sebelum diberlakukan kebijakan larangan rapat di hotel bagi aparatur negara pertumbuhannya naik dari bulan September sebesar 52,97 persen sampai bulan November menjadi sebesar 53,24 persen, namun terjadi penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya tingkat penghunian kamar hotel pada bulan Desember dan Januari menjadi sebesar 47,83 persen. Perkembangan TPK hotel juga bisa dilihat melalui Gambar di bawah:



Gambar 1.1. Pertumbuhan TPK 5 Bulan Terakhir

Gambar di atas terlihat bahwa tingkat penghunian kamar hotel menurun khususnya di dua bulan semenjak diberlakukannya pelarangan aparatur negara rapat di hotel, karena pada umumnya PNS tidak hanya rapat di hotel, tetapi sekaligus menginap.

Alasan untuk memilih objek penelitian ini adalah adanya kebijakan Kementerian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) terkait larangan pegawai negeri sipil melakukan rapat di hotel (Permen PAN-RB No. 10 Tahun 2014) yang mempengaruhi jumlah pemasukan hotel. Akibatnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Februari 2015 di sebagian besar wilayah di Indonesia turun. Di 27 provinsi, rata-rata TPK Februari 2015 adalah 47,59%, turun 1,22 poin dibandingkan Februari 2014 yang sebesar 48,81% (www.detik.com 1 April 2015). Obyek penelitian yang dipergunakan adalah hotel yang hanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengingat banyaknya hotel yang tersebar di seluruh Indonesia dan banyaknya

hotel yang bermunculan baik di daerah maupun di kota, berikut adalah empat belas daftar hotel yang dijadikan dalam objek penelitian:

Tabel 1.2. Perusahaan Perhotelan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE	NAMA HOTEL	LOKASI PUSAT
1	PT. Grahamas Citrawisata Tbk	GMCW	THE HILLS BUKITTINGGI HOTEL AND CONVENTION	Jl. Laras Datuk Bandaro Bukittinggi, Sumatera Barat 26115 (0752) 35000
2	PT. Hotel Mandarine Regency Tbk	HOME	GOODWAY HOTEL AND RESORT	Jl. Nusa Dua, Kuta Selatan Bali 80361 (0361) 773808
3	PT. Island Concept Indonesia Tbk	ICON	BALI ISLAND VILLAS	Raya Petitenget No 469 Seminyak Kuta 80361 Bali
4	PT. Indonesian Paradise Property Tbk	INPP	HARRIS HOTEL TUBAN	Jalan Dewi Sartika, Tuban, Bali 80361 (0361) 936525
5	PT. Jakarta International Hotel & Development Tbk	JIHD	HOTEL BOROBUDUR JAKARTA	Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3805555
6	PT. Jakarta Setiabudi International Tbk	JSPT	GRAND HYATT BALI	Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Nusa Dua, Bali 80363 (0361) 771234
7	PT. Mas Murni Indonesia Tbk	MAMI	GARDEN PALACE HOTEL	Jl. Yos Sudarso, No. 11, Surabaya Jawa Timur 60271 (031) 5320951
8	PT. Pudjiadi and Sons Tbk	PNSE	THE JAYAKARTA JAKARTA HOTEL & SPA	Jalan Hayam Wuruk 126, Jakarta Bara 11180 (021) 6496760
9	PT. Pusako Tarinka Tbk	PSKT	PUSAKO HOTEL BUKITTINGGI	Jl. Soekarno-Hatta No. 7, Bukittinggi, Sumatera Barat 26169 (0752) 32111
10	PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID	GRAND SAHID JAYA JAKARTA HOTEL	Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 (021) 5704444
11	PT. Arthavest Tbk	ARTA	REDTOP HOTEL	Jalan Pecenongan No.72, Jakarta Pusat 10120 (021) 3500077
12	PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA	ALILA VILLAS ULUWATU	Jl Belimbing Sari Banjar Tambiyak, Bali 80364 (0361) 8482166
13	PT. Pudjiadi prestige Tbk	PUDP	MARBELLA HOTEL CONVENTION AND SPA	Jl. Raya Karang Bolong KM.135 Serang, Banten 42466 (0254) 602345

NO	NAMA PERUSAHAAN	KODE	NAMA HOTEL	LOKASI PUSAT
14	PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk	PGLI	HOTEL TRAVELLERS SUITES	Jl T Amir Hamzah 68 Kompl Griya Riatur Indah Perladangan Helvetia, Medan Telpon: (061) 8476469

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2015)

Hal terpenting untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan adalah dilihat melalui kondisi keuangannya. Penilaian kondisi keuangan dan perkembangan perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan, yang berguna bagi perencanaan dan pengambilan keputusan, baik itu keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menilai kinerja laporan keuangan, ada beberapa tolak ukur yang sering digunakan. Tolak ukur tersebut yaitu dalam bentuk rasio atau indeks yang menghubungkan data keuangan. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, meliputi analisis rasio likuiditas, aktivitas, *leverage* dan *profitabilitas*. Analisis laporan keuangan akan lebih kuat jika dalam laporan keuangan dibandingkan dengan standar internal yang ditetapkan oleh perusahaan, perbandingan angka pada laporan keuangan masa kini dengan laporan keuangan masa lampau (historis), perbandingan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan sejenis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan dari perusahaan perhotelan saat sebelum dan sesudah kebijakan pelarangan aparatur negara rapat di hotel, hasil penelitian ini bermaksud untuk memberikan masukan terhadap Pemerintah agar kembali meninjau ulang kebijakan tersebut apabila memang terbukti terjadi perbedaan, karena ekonomi satu negara berkembang dibuat oleh kebijakan pemerintah, baik melalui *capital expenditure* dalam

pembangunan infrastruktur maupun melalui *operational expenditure*. Semakin negara itu berkembang, semakin akan bergantung pada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perhotelan yang Terdaftar di BEI Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pelarangan Aparatur Negara Rapat di Hotel”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah ada perbedaan kinerja keuangan hotel sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pelarangan aparatur negara rapat di hotel ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan hotel sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pelarangan aparatur negara rapat di hotel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan bukti empiris apakah setelah kebijakan pelarangan aparatur negara rapat di hotel, berdampak terhadap penurunan kinerja keuangan hotel.

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu akuntansi, terutama tentang kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada bisnis perhotelan dengan pendekatan rasio keuangan dan mengetahui bagaimana cara penggunaan dan interpretasinya.
3. Memberikan masukan bagi pihak hotel, untuk menyusun strategi bisnis yang lebih baik dalam mengatasi dampak kebijakan larangan aparaturnegara rapat di hotel
4. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian merupakan pokok-pokok uraian dari isi penulisan penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang materi dan pembahasan tentang penelitian secara menyeluruh yang diterapkan secara garis besar. Adapun garis besar dari sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pemanduan uraian-uraian mengenai masalah yang timbul sehingga mendorong penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi ini, yaitu kinerja keuangan

berdasarkan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktifitas, dan rasio solvabilitas. Bab ini juga akan menguraikan perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diulas mengenai metode penelitian yang meliputi definisi operasional variabel, teknik sampling, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas masalah perbedaan kinerja keuangan hotel sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pelarangan aparaturnegara rapat di hotel pada rasio keuangan antara lain: rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktifitas, dan rasio solvabilitas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, sedangkan saran sebagai masukan pada penelitian mendatang. Saran-saran yang diajukan untuk perbaikan pelaksanaan dan perbaikan penelitian berikutnya berdasarkan penerapan teori yang digunakan.